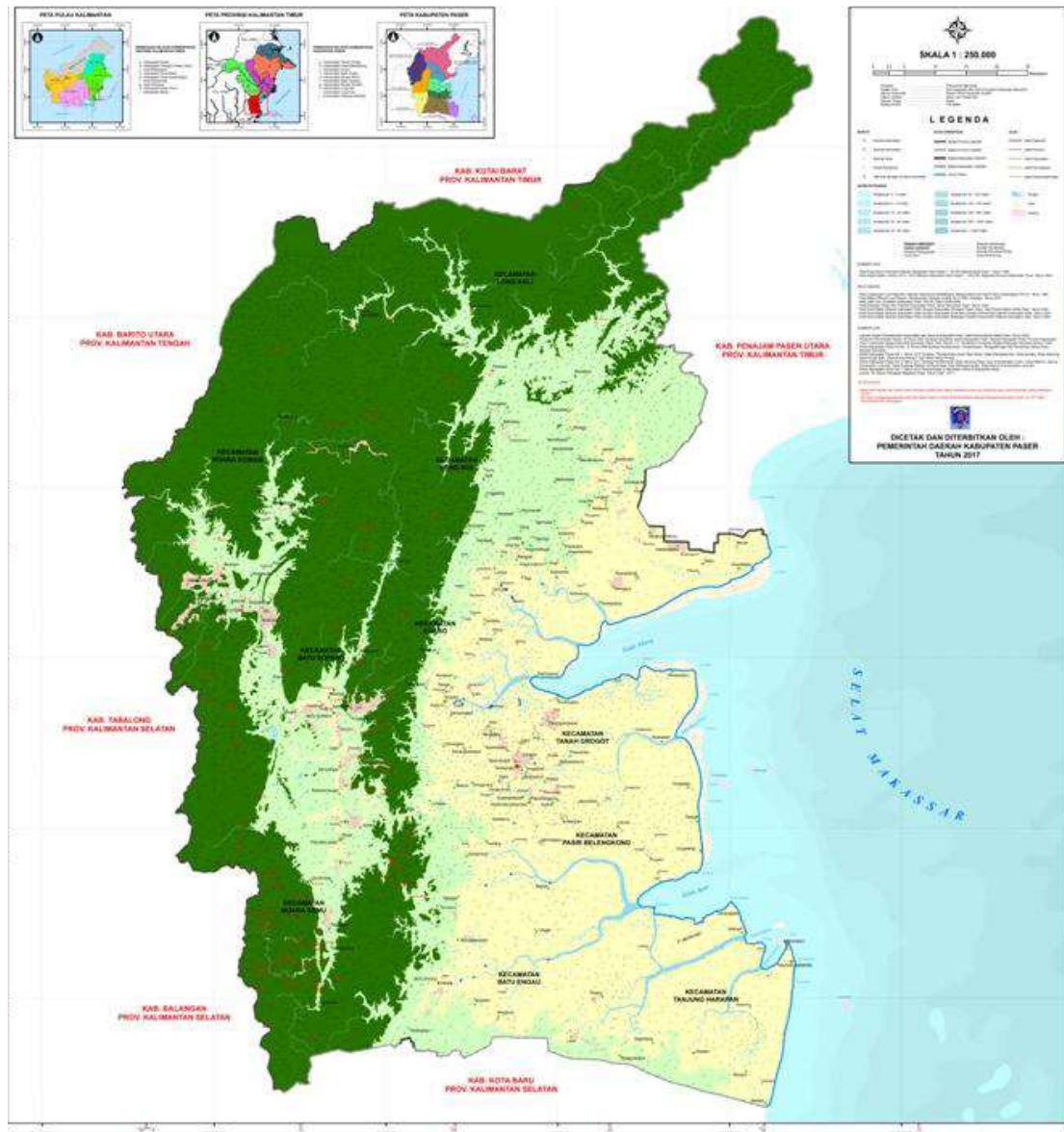


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN TAHUN 2023



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER
Kompleks Perkantoran Gedung A, Lantai 2 Kavling 1
Jln. Kusuma Bangsa KM 05 Tepian Batang Tana Paser
Kode Pos 76211

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Sekretariat Dinas Kesehatan.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023.

Tana Paser, 22 Februari 2023

ISBN

1. Judul I. *LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)*

Buku ini diterbitkan oleh

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Jln. Kusuma Bangsa KM 05 Kompleks Perkantoran Gedung A, Lantai 2 Kavling 1

Tepian Batang, Tanah Grogot Kabupaten Paser Kode Pos 76211

E-mail: dinkespaser.kaltim@gmail.com

Website: <http://dinkespaserkab.go.id>

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Pengarah

Jon Jauhari, SE., M.Si

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Ketua

M. Hasanudin, S.Sos

Perencana Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Penyusun dan Editor

Jon Jauhari, SE., M.Si

M. Hasanudin, S.Sos

Sumardin, SKM., M.Gizi

Ismail, SKM

Yana, SKM

Kontributor

Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPTD Puskesmas Tanjung Aru, UPTD Puskesmas Kerang, UPTD Puskesmas Suatang Baru, UPTD Puskesmas Suliliran Baru, UPTD Puskesmas Pasir Belengkong, UPTD Puskesmas Tanah Grogot, UPTD Puskesmas Senaken, UPTD Puskesmas Padang Pengrapat, UPTD Puskesmas Lolo, UPTD Puskesmas Muser, UPTD Puskesmas Muara Komam, UPTD Puskesmas Batu Kajang, UPTD Puskesmas Kuaro, UPTD Puskesmas Long Ikis, UPTD Puskesmas Kayungo, UPTD Puskesmas Krayan, UPTD Puskesmas Long Kali, UPTD Puskesmas Mendik, UPTD Puskesmas Sebakung Taka, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD Panglima Sebaya, RS Pratama Kerang, UPTD Perbekalan dan Alat Kesehatan dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER

Berkat rahmat dan izin Allah swt, disertai ucapan syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023 tepat waktu. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Paser Tahun 2023 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Bidang Kesehatan selama tahun 2023, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Kabupaten Paser.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan tahun 2023, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat membantu dalam membandingkan capaian kinerja pembangunan kesehatan pada tahun sebelumnya, mengukur capaian kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Paser serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Selain dalam bentuk cetakan, buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga tersedia dalam bentuk *soft copy* yang dapat diunduh melalui website. www.dinkespaserkab.go.id. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Paser. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimasa yang akan datang.

Tana Paser, 22 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser



Iqbal Jauhari, SE., M.Si

NIP. 196604131987031011

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2020	3
Gambar 1.2	Kecenderungan Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir	55

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rincian Program Dinas Kesehatan Dalam Rencana Kerja Tahun 2023	25
Tabel 2.2	Rincian Kegiatan Dinas Kesehatan Dalam Rencana Kerja Tahun 2023	26
Tabel 2.3	Rincian Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Dalam Rencana Kerja Tahun 2023	30
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Periode 2021-2026	42
Tabel 2.5	Formulasi perhitungan IKU Dinas Kesehatan	43
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023	47
Tabel 3.1	Nilai Capaian Kinerja dan Interpretasinya	49
Tabel 3.2	Target dan realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023	49
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dengan Tahun 2023	51
Tabel 3.4	Target Kinerja Restra Dinas Kesehatan Sampai tahun ke 5	52
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi Kinerja dengan Target Nasional	52
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi Kinerja dan Keuangan	55
Tabel 3.7	Analisis sumber daya dan penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022	57

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
TIM PENYUSUN	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR ISI		
BAB. I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sistematika Penyajian	19
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	
	2.1. RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN	21
	2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2022	24
	2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	42
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN	48
BAB. IV	PENUTUP	71

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan menilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati Paser yaitu Paser Maju Adil dan Sejahtera (Paser MAS) seperti yang tertuang dalam RPJMD, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser menetapkan 2 (dua) tujuan utama dan 4 (empat) sasaran strategis, dengan 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.0 Rincian Indikator dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	9 kasus	11 kasus	77,78
		Angka kematian bayi	6.3 per 1000 kelahiran hidup	10.2 per 1000 kelahiran hidup	38,10
		Angka kematian balita	7.4 per 1000 kelahiran hidup	12.6 per 1000 kelahiran hidup	29,72
		Prevalensi stunting	13.40%	13,98 %	95,67
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	81.6	84.70	103,79
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.3	0.259	83,33
3	Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM	Angka Kesakitan (Kasus baru Jumlah Kunjungan Rawat inap dan Rawat jalan di Puskesmas)	18 %	23 %	72,22
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP (Hasil Penilaian inspektorat (n-1)	B (68,94)	68,94	100
	Rata Rata Kinerja				75.58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean government dan good governance, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, dan Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

Kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk pertanggungjawaban kepada pejabat dan publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan LKjIP Dinas Kesehatan tahun 2023 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pembangunan bidang kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran perjanjian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Paser sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Paser.

Semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Paser. Selain itu laporan LKjIP ini merupakan pemenuhan hak terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. Upaya peningkatan kualitas laporan LKjIP Dinas kesehatan Kabupaten Paser terus dilakukan baik ketepatan waktu, validitas, kelengkapan, dan konsistensi data, sehingga pemanfaatan akan lebih optimal. Dengan adanya laporan LKjIP ini diharapkan agar semua pihak dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berbasis kinerja. Berbagai kekurangan yang ada dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja ditahun mendatang demi terwujudnya Kabupaten Paser Yang Maju Adil dan Sejahtera (Paser MAS)

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang paling penting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan

dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan Kinerja Dinas Kesehatan

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.3.1 Kedudukan

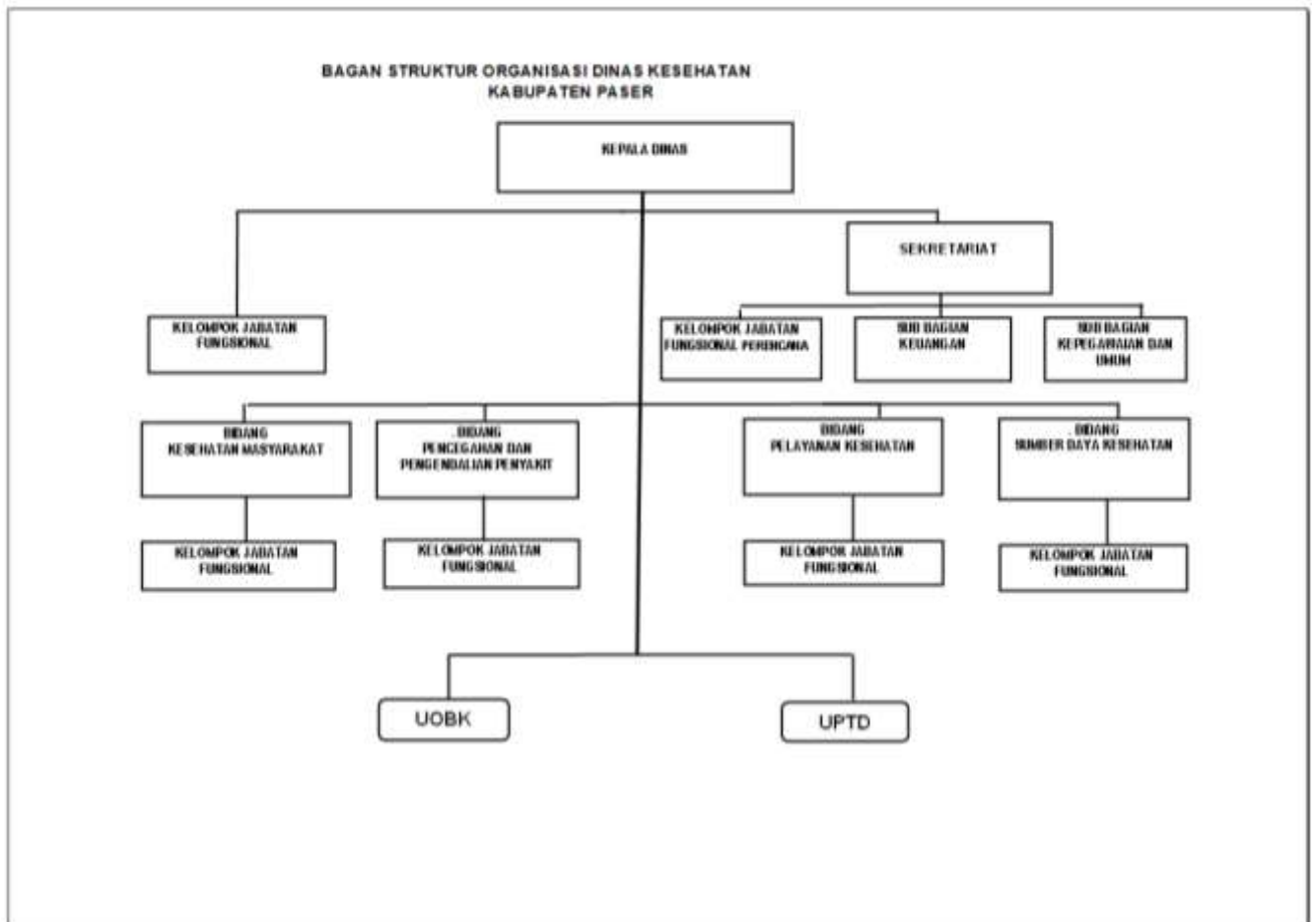
- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang kesehatan.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum ;
 2. Subbagian Keuangan ; dan
 3. Jabatan Fungsional ;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Jabatan Fungsional ;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Jabatan Fungsional ;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Jabatan Fungsional ;
 - g. UOBK;
 - h. UPTD ; dan
 1. Jabatan Fungsional

(2) Lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor : 4 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta Tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan :



1.3.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Kepala Dinas

Tugas

Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
- e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan yang meliputi bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman , peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di

- bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
 - m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
 - n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Dinas;
 - o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

- p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang kesehatan .
- q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekertariat

Tugas

Merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.

Fungsi:

- a. Pemberian petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Pemberian petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran ;
- c. Perumusan peijanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan pertindang-undangan ;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
- e. pengoordinasian penyusunan dan

- mensosialisasikan standaroperasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas;
 - g. pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;
 - h. pelaksanaan administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
 - i. Pelaksanaan administrasi pendapatan Daerah kewenangan pada Dinas;
 - j. Pelaksanaan administrasi kepegawaian pada Dinas;
 - k. Pelaksanaan administrasi umum pada Dinas;
 - l. Pengadaan barang milik Daerah penunjaig urusan pemerintah daerahpada Dinas;
 - m. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah pada Dinas;
 - n. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas;
 - o. Pelaksanaan penyiapan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal dibidang kesehatan;
 - p Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - g. pelaksanaan publikasi dan hubungan Masyarakat di lingkungan dinas;
 - r. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
 - s. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilingkungan Dinas.
 - t. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas;
 - u Pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas;
- w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas;
- z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Dinas;
- aa. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- bb. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di bidang kesehatan ;
- cc. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan pada Dinas;
- dd. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ee. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan

- ff. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan

Subbag Umum

Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, dayanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata baksana serta pengelolaan barang milik Daerah.

Uraian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;
- f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;

- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subbag Keuangan

Tugas

Melaksanakan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana lcerja dan perianjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- g. Melaksanakan penyediaari administrasi pelaksanaan tugas aparatur sipil negara;
- h Melaksanakan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan pada Dinas;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan akuntansi pada Dinas;
- j. Mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan akhir tabun pada Dinas;
- k. Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;
- l M engoordinasikan dan menyusun laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran pada Dinas;
- m. Menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

- n. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, penyuluhan dan pelaporan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan
- p. Melaksanakan penilaian tugas bawahan

Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas

Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan program Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perianjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kesehatan Masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- h. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- k. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan balita;

- l. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- m. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- n. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- o. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- p. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
- q. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga;
- r. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan;
- s. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya;
- u. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa;
- v. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika psikotropika dan zat adiktif;
- w. Pelaksanaan deteksi dini penyalahgunaan narkotika psikotropika;
- x. Pelaksanaan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- w. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- aa Pelaksanaan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- bb Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- cc Pemberian petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;

- dd Pelaksanaan monitoring, evaluasi data pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Masyarakat;
- ee Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- ff Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- gg Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas :

Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Fungsi :

- a. Perencanaan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

- e. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- f. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- g. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelaksanaan perigelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- k. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
- l. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;
- m. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- n. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pengelolaan surveilans kesehatan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan upaya kesehatan khusus;
- q. Pelaksanaan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan;
- r. Pelaksanaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
- s. Pelaksanaan pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial kejadian luar biasa ke laboratorium rujukan/nasional;
- t. Pelaksanaan penyelenggaraan kabupaten/kota sehat;
- p. Pelaksanaan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal);
- q. Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah
- r. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
- s. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene

- sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum;
- t. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembiraaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
 - u. Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan;
 - x. Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga;
 - y. Pemberian petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan ;
 - z. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporari terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas;
 - aa. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - bb. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - cc. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas

Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan Kesehatan.

Fungsi

- a. Perencanaan program Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategi, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pelayanan Kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- h pelaksanaan pembarigunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
- i. Pelaksanaan pembangunan puskesmas;
- j. Pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya;
- k. Pelaksanaan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan;
- l. Pelaksanaan pengembangan rumah sakit;
- m. Pelaksanaan pengembangan puskesmas;
- n. Pelaksanaan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya;
- o. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit;
- p. Pelaksanaan rehabilitast dart pemeliharaan puskesmas;
- q. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya;
- r. Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenagakesehatan ;
- s. Pelaksanaan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan;
- t. Pelaksanaan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanankesehatan ;
- u. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- v. Pelaksanaan penyediaan teiemedicine di fasilitas

- pelayanan kesehatan;
- w. Pelaksanaan pengelolaan penelitian kesehatan;
 - x. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota;
 - y. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawatdarurat terpadu
 - aa pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan ;
 - bb Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
 - cc Pelaksanaan pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet;
 - dd Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut
 - ee Pengawasan perizinan rumah sakit kelas c, d dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
 - ff Pelaksanaan peningkatan tata Kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten;
 - gg Pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
 - hh Pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
 - ii pemberian petunjuk **pelaksanaan** tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 - jj pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas;
 - kk pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - ll pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan ; dan
 - mm pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas

Memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya Kesehatan.

Fungsi

- a. Perencanaan program Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas;
- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
- d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan;
- f. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan ;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang sumber daya kesehatan;
- h. Pelaksanaan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
- i. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi ;
- j. Pelaksanaan pengadaan obat, vaksin;
- k. Pelaksanaan pengadaan bahan habis pakai;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Pelaksanaan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan ;
- n. Pelaksanaan pembiraaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik

- tenaga kesehatan;
- o. Pelaksanaan perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan ;
 - p. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;
 - q. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan;
 - r. Pelaksanaan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten ;
 - l. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
 - t. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
 - u. Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
 - v. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - w. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - x. pemberian petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 - y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas;
 - z. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - aa. Pemberian saran dan pertimbangan teknis

kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang Sumber Daya Kesehatan; dan

- bb Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2023 akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang, agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun pada subbag perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Bagian yang ditanda tangani oleh penanggung jawab organisasi dan berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan mengenai akuntabilitas kinerja organisasi yang bersangkutan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menginformasikan secara singkat capaian kinerja strategis yang direncanakan

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (***issue strategis***) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis dan realisasi kinerja Tahun 2023.

BAB. IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Bertitik tolak dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), Bupati terpilih mempunyai visi yaitu :

“ MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA ”

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

Dalam bidang kesehatan, visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dapat diartikan sebagai berikut :

“ Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera “ visi ini dalam bidang kesehatan dapat diartikan sebagai berikut :

- Menuju** : Mengarahkan, membawa sesuatu ke arah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara kelembagaan yaitu menuju masyarakat Paser yang sehat secara fisik-jasmani, mental-spiritual serta sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis
- Kab. Paser** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kabupaten Paser dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak Kabupaten Paser berdiri - hingga sekarang.
- Maju** : Bergerak maju kedepan bersama-sama membawa ke dalam keadaan yang lebih baik dapat diartikan bergerak selangkah lebih maju dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Paser.
- Adil** : diartikan bahwa diperlukan keadilan dalam pelayanan kesehatan terhadap jenis kelamin, suku, ras, golongan, status sosial, wilayah dan kemampuan yang berbeda, baik dari aspek akses, partisipasi, pengawasan maupun aspek manfaat.
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi rohani, akal, dan jasad. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Paser untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kabupaten lainnya.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kabupaten Paser “ **Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil dan Sejahtera** “ bermakna “ Menuju masyarakat Kabupaten Paser yang sehat secara fisik-jasmani, mental-spiritual serta sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, golongan, status sosial, wilayah dan kemampuan yang berbeda, baik dari aspek akses, partisipasi, pengawasan maupun aspek manfaat untuk mewujudkan, kesejahteraan lahir dan batin yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial, masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Paser yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2021-2026 yang menjadi perwujudan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser berada pada misi 2 dan misi 4 yaitu sebagai berikut :

Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dengan berlandaskan nilai-nilai social, agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan serta menjamin terselenggaranya pelayanan, kesehatan dengan akses yang mudah, terjangkau bermutu, adil dan merata.

1. Tujuan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, dirumuskan 2 (dua) Tujuan Renstra Kabupaten Paser yaitu :

Tujuan 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 2. Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Perangkat Daerah

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan dengan indikator yang memenuhi kriteria SMART (spesific, measurable, achievable, relevan dan time-bound), yaitu

suatu indikator haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja Sasaran Dinas Kesehatan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu sasaran RPJMD yang terdiri dari 4 (empat) sasaran yaitu :

- Sasaran 1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak
- Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
- Sasaran 3. Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM
- Sasaran 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2023

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan/pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023, mencakup 5 program, 23 Kegiatan dan 127 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rincian Program Dinas Kesehatan Dalam Rencana Kerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL		TARGET TAHUN 2023		KETERANGAN
			Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	80	%	100	%	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi	80	%	100	%	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan obat, alkes & makanan minuman	55	%	100	%	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	80	%	100	%	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase pemenuhan urusan penunjang pemerintah daerah	84,1	%	100	%	

Tabel 2.2 Rincian Kegiatan Dinas Kesehatan Dalam Rencana Kerja Tahun 2023

No	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN 2023		KET.
			Nilai	Satuan	Nilai	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang tersedia	58,55	%	80	%	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan yang tersedia	80	%	85	%	
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100	%	100	%	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan Izin RS kelas C dan D dan fasyankes	100	%	100	%	
5	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan	100	%	100	%	
6	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100	%	100	%	

7	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM	60 (654)	%	70	%	
8	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin untuk apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100	%	100	%	
9	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Presentase sertifikat produksi sarana produksi alkes kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu yang diberikan	0	%	0	%	
10	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	20	%	35	%	
11	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase penerbitan sertifikat laik higienis sanitasi TPM.	3,01	%	44	%	

12	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentasi penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	0	%	45	%	
13	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang ditindaklanjuti	0	%	20	%	
14	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Germas)	Presentase kec yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	0	%	25	%	
15	Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotof, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	45	%	50	%	
16	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Presentse UKBM yang dikembangkan (posy aktif)	37,2	%	50	%	
17	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	%	100	%	
18	Adminitrasi Keuangan	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	100	%	100	%	

19	Adminitrasi Umum	Presentase penyediaan dokumen dan laporan adminitrasi umum	100	%	100	%	
		Presentase dokumen dan laporan pengadaan barang dan jasa yang tersusun	100	%	100	%	
		Presentase dokumen pemeliharaan adminitansi umum yang tersusun	100	%	100	%	
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	%	100	%	
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	%	100	%	
22	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	100	%	
23	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase UPT terlayani BLUD	100	%	100	%	

Tabel 2.3 Rincian Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Dalam Rencana Kerja Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun
4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun
5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas

10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
14	Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional <i>Maintainance Center</i>
16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan
18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan
19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan
20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
27	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar

33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
34	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanann Kesehatan Lingkungan
39	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
44	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus

45	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
46	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
47	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
48	Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah
49	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
50	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
51	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas
52	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan
53	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
54	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
55	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

56	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota
57	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
58	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
59	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
61	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
62	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
63	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan
64	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
65	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar

66	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
67	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
68	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
69	Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perijinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
70	Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
71	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
72	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
73	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
74	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

75	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
76	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin
77	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
78	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
79	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
80	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

81	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
82	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
83	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan
84	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
85	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
86	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat
87	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
88	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
89	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
90	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

91	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
92	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
93	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
94	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
96	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
97	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
98	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
99	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
100	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
101	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
102	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

103	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
105	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
106	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
107	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
108	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
109	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
110	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
111	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
112	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
113	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
114	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
115	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
116	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

117	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
118	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
119	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
121	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
122	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
123	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
124	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
125	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
126	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
127	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama, merupakan acuan yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Makna penetapan kinerja adalah untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan kesehatan. Penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai indikator kinerja utama (key performance indikator). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Periode 2021-2026

Tujuan								
Sasaran								
1) Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak								
No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka kematian ibu	11 kasus	10 kasus	9 kasus	8 kasus	6 kasus	4 kasus	4 kasus
2	Angka kematian bayi	8.3 per 1000 kelahiran hidup	7.3 per 1000 kelahiran hidup	6.3 per 1000 kelahiran hidup	5.3 per 1000 kelahiran hidup	4.3 per 1000 kelahiran hidup	3.3 per 1000 kelahiran hidup	3.3 per 1000 kelahiran hidup
3	Angka kematian balita	9.4 per 1000 kelahiran hidup	8.4 per 1000 kelahiran hidup	7.4 per 1000 kelahiran hidup	6.4 per 1000 kelahiran hidup	5.4 per 1000 kelahiran hidup	4.4 per 1000 kelahiran hidup	4.4 per 1000 kelahiran hidup
4	Prevalensi stunting	15.40%	14.40 %	13.40%	12.40%	11.40%	10.40%	10.40%
Sasaran								
2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	76.6	81.6	86.6	91.6	96.6	96.6
2	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.17	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
Sasaran								
3) Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM								
3	Angka Kesakitan	19.20%	18.5%	18%	17.5%	17%	16.5%	16.5%
Tujuan								
Sasaran								
Meningkatnya tata kelola dan pelayanan Perangkat Daerah								
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan								
1	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP (Hasil Penilaian inspektorat)	60	65	70	75	80	85	85

Tabel 2.5 Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Periode 2021-2026

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan dan Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi balita stunting	<p>Penjelasan : Status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = <-2 SD,</p> <p>Formula Jumlah anak balita yang mengalami stunting di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah seluruh balita di satu wlyh kerja dalam kurun waktu yang sama x 100</p>	Bid. Kesmas	Laporan bulanan KIA Gizi, data EPPBGM	
2		Angka kematian Ibu	<p>Penjelasan : Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.</p> <p>Formula Jumlah kematian ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000</p>	Bid. Kesmas	Laporan bulanan KIA Gizi, buku kohort ibu dan anak	
3		Angka kematian bayi	<p>Penjelasan : Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal)</p> <p>Formula :</p>	Bid. Kesmas	Laporan bulanan KIA Gizi, buku kohort ibu dan anak	

			Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000			
4		Angka kematian balita	Penjelasan : Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) Formula : Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi + anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu DIBAGI Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	Bid. Kesmas	Laporan bulanan KIA Gizi, buku kohort ibu dan anak)	
5		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Penjelasan : Perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0-1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 Formula : $\frac{\sum \text{Indikator bernilai 1}}{\sum N}$ DIBAGI 12	Bid. Yankes	Laporan Pembaharuan Data Bulanan PIS-PK puskesmas	
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kesehatan	Penjelasan : Kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik Formula : IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur DIBAGI total nilai yang terisi x Nilai penimbang	Bid. Yankes	Landasan Hukum : Permenpan Nomor 14 tahun 2017	

			IKM Unit pelayanan x 25			
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	<p>Penjelasan : Morbiditas/persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan.</p> <p>Formula : AM : (JPKK DIBAGI JP) X 100 AM : Angka morbiditas JPKK : Jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas JP : Jumlah penduduk Kostanta : 100%</p>	Bid. Yankes Bid. P2P	Laporan LB 1 (kasus baru jumlah kunjungan rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas	
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi OPD oleh inspektorat	Ka dinkes, Subbag. perencanaan dan subbag keuangan	DPA / RKA	

b. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	9 kasus
		Angka kematian bayi	6.3 per 1000 kelahiran hidup
		Angka kematian balita	7.4 per 1000 kelahiran hidup
		Prevalensi stunting	13.40%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	81,61
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.3
3	Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM	Angka Kesakitan	18 %
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan BMD dan keuangan yang akuntabel	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	B (68,94)

Dengan rincian anggaran setiap program adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	149.670.994.917	APBD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	352.035.334.820	ABPD/DAK
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	43.519.115.916	APBD
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	61.749.700	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.076.622.240	ABPD/DAK
	TOTAL	546.363.817.593,00	ABPD/DAK

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

3.1.1 Target dan Realisasi Kenerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja yang telah ditetapkan tahun berjalan kemudian dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan di awal tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase

capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Rumus diatas memberikan penjelasan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{realisasi-target})}{\text{Target}} \times 100 \text{ persen}$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan, nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai Capaian Kinerja dan Interpretasinya

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik sekali)
2	> 75-100 %	Sesuai target (Baik)
3	55 – 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4	< 50 %	Tidak mencapai target (kurang)

Berikut realisasi kinerja dan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target dan realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi Kinerja	%
		Kinerja			
1	Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak	Angka kematian ibu	9 kasus	11 kasus	77,78
2		Angka kematian bayi	6.3 per 1000 kelahiran hidup	10.2 per 1000 kelahiran hidup	38,10
3		Angka kematian balita	7.4 per 1000 kelahiran hidup	12.6 per 1000 kelahiran hidup	29,72
4		Prevalensi stunting	13.40%	13,98 %	95,67
5	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	81.6	84.70	103,79
6		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.3	0.259	83,33
7	Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian akibat PM dan PTM	Angka Kesakitan (Kasus baru Jumlah Kunjungan Rawat inap dan Rawat jalan di Puskesmas)	18 %	23 %	72,22
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP (Hasil Penilaian inspektorat (n-1)	B (68,94)	68,94	100
	RATA RATA KINERJA				75,58

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Tahun Sebelumnya.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan

perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hasil dari kinerja program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada tahun anggaran 2023 dijelaskan berdasarkan pencapaian dalam pengukuran kinerja, Berikut ini perbandingan capaian kinerja dan realisasi kinerja tahun sebelumnya :

Tabel 3.3 Perbandingan Kinerja dan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka kematian ibu	10 kasus	5 kasus	9 kasus	11 kasus
2	Angka kematian bayi	7.3 per 1000 kelahiran hidup	13,2 per 1000 kelahiran hidup	6.3 per 1000 kelahiran hidup	10.2 per 1000 kelahiran hidup
3	Angka kematian balita	8.4 per 1000 kelahiran hidup	13,95 per 1000 kelahiran hidup	7.4 per 1000 kelahiran hidup	12.6 per 1000 kelahiran hidup
4	Prevalensi stunting	14.40 %	15,89	13.40%	13,98 %
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	76.6	81,84	81.6	84.70
6	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.2	0,22	0.3	0.259
7	Angka Kesakitan (Kasus baru Jumlah Kunjungan Rawat inap dan Rawat jalan di Puskesmas)	18.5%	23,98	18 %	23 %
8	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP (Hasil Penilaian inspektorat (n-1)	B	B (68,75)	B (68,94)	B(68,94)

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Renstra

Perbandingan capaian kinerja dengan target renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Periode Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target Kinerja Renstra Dinas Kesehatan Sampai tahun ke 5

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka kematian ibu	11 kasus	10 kasus	9 kasus	8 kasus	6 kasus	4 kasus	4 kasus
2	Angka kematian bayi	8.3 per 1000 kelahiran hidup	7.3 per 1000 kelahiran hidup	6.3 per 1000 kelahiran hidup	5.3 per 1000 kelahiran hidup	4.3 per 1000 kelahiran hidup	3.3 per 1000 kelahiran hidup	3.3 per 1000 kelahiran hidup
3	Angka kematian balita	9.4 per 1000 kelahiran hidup	8.4 per 1000 kelahiran hidup	7.4 per 1000 kelahiran hidup	6.4 per 1000 kelahiran hidup	5.4 per 1000 kelahiran hidup	4.4 per 1000 kelahiran hidup	4.4 per 1000 kelahiran hidup
4	Prevalensi stunting	15.40%	14.40%	13.40%	12.40%	11.40%	10.40%	10.40%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	N/A	76.6	81.6	86.6	91.6	96.6	96.6
6	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.17	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
7	Angka Kesakitan	19.20%	18.5%	18%	17.50%	17%	16.50%	16.50%
8	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP (Hasil Penilaian inspektorat)	60	65	70	75	80	85	85

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada renstra Dinas Kesehatan Kabupaten paser periode Tahunin 2021-2026 terdapat beberapa indicator yang telah menyesuaikan dengan indicator pada Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu angka kematian ibu, bayi, balita, prevalensi stunting, dan indeks keluarga sehat (IKS) serta indeks kepuasan masyarakat (IKM). Berikut [erbandingan realisasi kiner sesuai dengan standar nasional :

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dengan Renstra Kemenkes Tahun 2022

No	Indikator	Renstra Dinkes 2023		Renstra Kemenkes Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Angka kematian ibu	9 kasus	11 kasus	183 per 1000 kelahiran hidup	13,2 per 1000 kelahiran hidup
2	Angka kematian bayi	6.3 per 1000 kelahiran hidup	10.2 per 1000 kelahiran hidup	16 per 1000 kelahiran hidup	13,95 per 1000 kelahiran hidup
3	Angka kematian balita	7.4 per 1000 kelahiran hidup	12.6 per 1000 kelahiran hidup	25 per 1000 kelahiran hidup	38 per 1000 kelahiran hidup
4	Prevalensi stunting	13.40%	13,98 %	14	15,89
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Permenpan No. 14 Tahun 2017)	81.6	84.70	100	81,84
6	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0.3	0.259	1	0,22
7	Nilai SAKIP	B (68,94)	B(68,94)		

3.1.5 Analisis Penyebab/ Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

a. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

1. Meningkatnya angka kematian ibu hamil disebabkan karena menurunnya capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil dengan indikatornya adalah :
 - Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar baru mencapai 86,33 persen,
 - Kunjungan K4 dan K6 baru mencapai 85,1 dan 70,0 persen
 - Persalinan di fasyankes baru mencapai 89,6 persen
 - Ibu hamil mengkonsumsi TTD baru mencapai 80,2 persen
2. Meningkatnya Angka kermatian Bayi dan balita kemungkinan disebabkan menurunnya capaian kegiatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita antara lain :
 - Menurunnya capaian desa UCI hanya mencapai 47,2 persen
 - Meningkatnya jumlah BBLR mencapai 5,1 persen dari total bayi baru lahir

- Balita dipantau tumbuh kembangnya baru mencapai 51,1 persen
- Pelayanan kesehatan sesuai standar pada balita baru mencapai 89,36 persen
- Balita mendapat vitamin A baru mencapai 80,5 persen

3. Menurunnya prevalensi stunting,

Penurunan prevalensi stunting dari 15,89 tahun 2022 turun menjadi 13,89 pada tahun 2023, walaupun penurunan tersebut belum mencapai target renstra yaitu 13,40 persen. Penurunan kemungkinan disebabkan banyak faktor di antaranya :

- Memberikan Tablet Tambah Darah (TTD) kepada remaja putri melalui program aksi gizi pada semua siswi sekolah menengah pertama (kelas 3) dan menengah atas diseluruh wilayah kabupaten Paser hampir mencapai 90 pesen
- Peningkatan pemberian protein hewani melalui pemberian makanan tambahan (PMT) pada kasus stunting, berupa pemberian telur dan susu pada program sari sate bunting (satu hari 1 telur)
- Keterlibatan lintas sektor termasuk penggunaan alokasi dana desa untuk penanganan stunting berupa pemberian protein pada kasus stunting diwilayah kerjanya, keterlibatan beberapa perusahaan dalam penanganan stunting, edukasi yang dilakukan secara terus menerus melalui aksi konvergensi stunting.

4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), disebabkan beberapa hal antara lain :

- Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi paripurna (target renstra 2 puskesmas menjadi 10 puskesmas) 2 klinik swasta dan 1 (satu) RSUD. Selain itu jumlah tenaga kesehatan semakin meningkat terutama tenaga kesehatan yang bertugas di pusban, polindes dan poskesdes. Demikian juga sarana prasarana pelayanan kesehatan terus diupayakan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

5. Meningkatnya indeks keluarga sehat.

Walaupun peningkatan indeks keluarga sehat sangat kecil (kategori) tidak sehat namun disertai dengan peningkatan jumlah

rumah tangga yang dilakukan intervensi yang mencapai hampir 87 persen.

b. Solusi dan Pemecahan Masalah

Sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dirasakan perlu diupayakan untuk memperkuat peran Dinas Kesehatan Kabupaten Paser. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengembangkan proses penyusunan perencanaan sampai pada unit terkecil jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten Paser yang telah dimiliki oleh Dinas Kesehatan serta mendorong tumbuhnya sistem perencanaan secara bottom up yang diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan berkualitas sesuai kondisi wilayah setempat yang membawa Dinas Kesehatan menjadi institusi yang kredibel dan profesional.
2. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas, sinkronisasi kegiatan masing-masing bidang dan seksi, evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang berada dibawah kendali sekretariat.
3. Optimalisasi, sistem perencanaan, pelaporan dan kegiatan berbasis teknologi yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan aktual untuk mendukung kualitas perencanaan.

3.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 7 (tujuh) tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

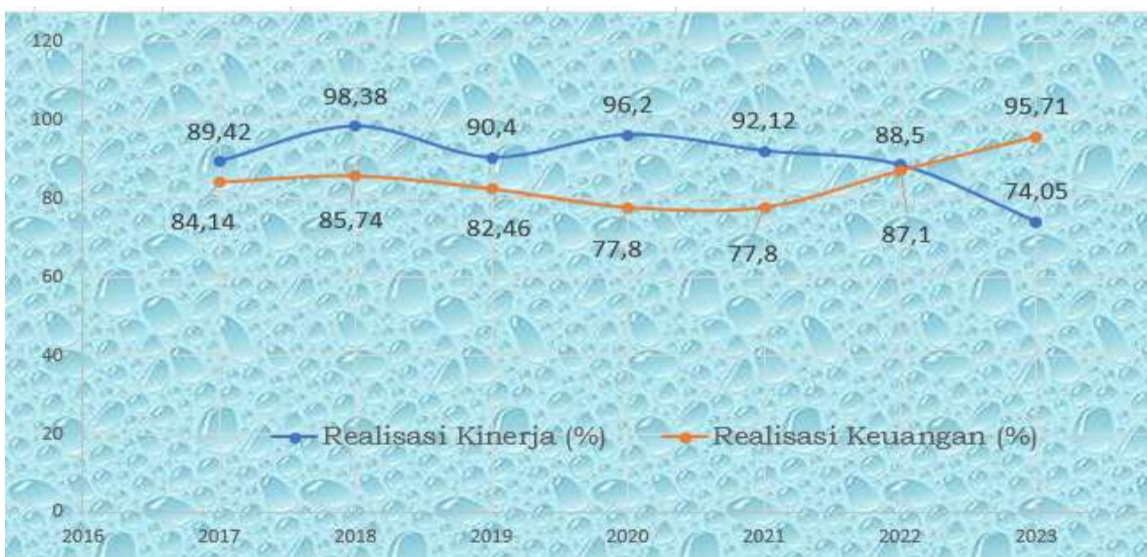
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir

NO	Tahun	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
1	2017	89,42	84.18
2	2018	98,38	85.74
3	2019	90.4	82.46
4	2020	96.2	77.8
5	2021	92.12	77.8
6	2022	88,5	87,1
7	2023	75,58	95,71

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Periode Tahun 2017-2023

Berdasarkan tabel 3.6 realisasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dalam 7 (tujuh) tahun terakhir sangat fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir seperti ditunjukkan pada gambar 6.1 dibawa ini.

Gambar 1.6 Kecenderungan Capaian Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan dalam 7 (tujuh) tahun terakhir



3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Berikut tabel perbandingan analisis sumber daya dan penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023 :

Tabel. 3.7 Analisis sumber daya dan penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023

Perangkat Daerah / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Setelah Perubahan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023	
				Triwulan ke 1		Triwulan ke 2		Triwulan ke 3		Triwulan ke 4					
				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(2)	(5)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Cakupan Pelayanan UKM dan UKP	100%	352.035.334.820	25%	7.281.398.975	25%	70.559.304.596	25%	30.631.976.472	25%	234.996.554.571	100%	343.469.234.614	100,00%	97,57%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Presentase fasilitas pelayanan kesehatan UKM dan UKP yang disediakan	86%	76.220.253.442	2%	72.168.416,00	20%	920.339.205	0,28	8.128.474.730	0,36	62.999.855.462	86%	72.120.837.813	100,0%	94,62%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5	18.271.243.603	0	0	0	-	0	4.837.986.648,00	5	13.387.721.841	5,00	18.225.708.489	100,00%	99,75%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	15	4.181.560.000	0	0	0	-	0	1.020.000,00	15	4.172.706.500	15,00	4.173.726.500	100,00%	99,81%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	10	1.078.640.000	0	0	0	-	0	510.000,00	10	570.074.800	10,00	570.584.800	100,00%	52,90%
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19	4.254.140.000	0	0	0	-	1	896.660.000,00	18	2.130.258.730	19,00	3.026.918.730	100,00%	71,15%
Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100	39.256.476.234	0	7.800.000	0	32.579.873	0	44.109.500	100	37.579.787.451	100,00	37.664.276.824	100,00%	95,94%

Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2	5.063.861.541	0	21.830.000	0	46.441.927	1	1.232.489.038	1	3.315.402.231	2,00	4.616.163.196	100,00%	91,16%
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	3.446.417.248	0	0	-	793.730.475	0	958.167.674	1	1.543.358.151	1,00	3.295.256.300	100,00%	95,61%
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	10	16.740.966,00	0	0	0	-	1	16.698.000	-	-	1,00	16.698.000	10,00%	99,74%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	60	353.563.600	5	42.538.416	5	11.237.580	20	100.774.120	30	123.174.125	60,00	277.724.241	100,00%	78,55%
Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	297.610.250	1	0	1	36.349.350	1	40.059.750	1	177.371.633	4,00	253.780.733	100,00%	85,27%
							-					-	-		
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang disediakan	100%	274.974.138.378	25%	7.200.000.559	25%	69.590.227.241	25%	22.320.044.111	25%	171.481.916.668	100%	270.592.188.579	100,0%	98,41%
												-	-		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.354	1.806.949.500	1262	8.680.000	1119	12.080.000	1092	447.728.000	4500	454.660.500	7.973,00	923.148.500	148,92%	51,09%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5167	323.085.000	1242	0	1168	29.900.000	1157	82.059.000	4737	66.462.800	8.304,00	178.421.800	160,71%	55,22%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5167	442.598.000	1155	8.680.000	1103	246.000	1127	8.412.000	1221	395.799.000	4.606,00	413.137.000	89,14%	93,34%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.647	1.528.386.500	5434	2.150.000	4648	15.268.380	6191	152.797.500	7496	1.041.158.500	23.769,00	1.211.374.380	96,44%	79,26%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33183	734.115.500	6255	0	7452	-	16832	232.611.000	8432	409.295.900	38.971,00	641.906.900	117,44%	87,44%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	194.206	233.992.500	17284	0	22071	-	35097	98.182.500	45473	101.640.000	##### ###	199.822.500	61,75%	85,40%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.058	468.782.000	3997	0	3769	14.470.000	3996	189.635.046	3022	199.406.646	14.784,00	403.511.692	81,87%	86,08%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83.337	6.600.000	4785	0	6913	-	6962	-	22381	6.600.000	41.041,00	6.600.000	49,25%	100,00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6682	260.832.000	788	0	1335	-	1627	-	893	260.663.320	4.643,00	260.663.320	69,49%	99,94%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	473	125.202.500	234	0	41	-	31	46.032.500	32	51.660.000	338,00	97.692.500	71,46%	78,03%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1097	344.779.500	875	0	999	-	1353	57.205.000	1960	199.753.290	5.187,00	256.958.290	472,84%	74,53%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12211	184.057.500	1276	0	1218	-	3120	68.347.500	2198	76.891.440	7.812,00	145.238.940	63,98%	78,91%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	19	406.120.000	0	0	2	8.680.000	2	5.840.000	15	176.295.000	19,00	190.815.000	100,00%	46,98%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19	4.008.622.510	4	15.742.000	2	32.245.000	6	371.512.460	7	986.101.839	19,00	1.405.601.299	100,00%	35,06%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19	272.127.000			2	2.270.000	6	63.775.000	11	164.899.000	19,00	230.944.000	100,00%	84,87%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19	1.016.971.600	4	45.132.148	2	28.560.000	6	448.754.200	7	395.357.102	19,00	917.803.450	100,00%	90,25%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19	1.006.794.610	4	8.830.000	2	25.525.000	6	273.447.000	7	421.999.500	19,00	729.801.500	100,00%	72,49%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	19	167.967.000	4	30.082.110	7	4.620.000	6	50.652.000	2	80.749.321	19,00	166.103.431	100,00%	98,89%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19	409.602.700	0	0		-	6	45.813.000	13	157.099.260	19,00	202.912.260	100,00%	49,54%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12857	38.426.000	0	0	695	4.040.000	200	14.700.000	19.520.000	895,00	38.260.000	6,96%	99,57%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3942	101.087.500	0	0	-	-	1	24.175.000	68.932.500	1,00	93.107.500	0,03%	92,11%
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3	135.685.000	0	2.250.000	1	11.385.000	1	8.435.000	58.056.600	3,00	63.256.600	100,00%	46,62%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	19	2.936.532.190	0	1.485.000	1	2.775.000	9	1.050.885.000	1.542.750.340	19,00	2.597.895.340	100,00%	88,47%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	47.063.162.600	0,25	6.819.271.200	0,25	11.946.745.48	0,25	15.667.529.579	12.466.159.100	1,00	46.899.705.327	100,00%	99,65%
Deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30%	18.240.000	0	0	0	-	-	2.420.000	4.075.000	0,30	6.495.000	100,00%	35,61%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	8.750.000	0	0	0	-	0	350.000	-	1,00	350.000	100,00%	4,00%
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4	70.302.000	0	0	0	-	0	-	69.694.900	4,00	69.694.900	100,00%	99,14%
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1	18.555.000	0	0	0	-	0	5.680.000	4.840.000	1,00	10.520.000	100,00%	56,70%
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	178.741.352.220	0	0	0,0	56.669.304.381	0	872.680.593	130.203.290.829	1,00	#187.745.275.803	100,00%	105,04%
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	19	29.462.478.048	4	143.196.600	5	717.883.797	7	1.686.929.738	19.563.248.038	19,00	22.111.258.173	100,00%	75,05%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	993.569.070	0	47.789.450	0	49.695.735	1	159.401.150	706.686.872	2,00	963.573.207	100,00%	96,98%

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	5	436.042.000	0	52.143.551	1	7.200.000	1	63.267.000	3	266.510.450	5,00	389.121.001	100,00%	89,24%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1	139.550.000	0	12.318.500	0	4.713.500	0	23.920.345	1	53.455.000	1,00	94.407.345	100,00%	67,65%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	44.250.550	0	0	0	2.620.000	0	3.040.000	1	15.987.700	1,00	21.647.700	100,00%	48,92%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	368.541.280	0	0	-	0	-	-	1	363.324.341	1,00	363.324.341	100,00%	98,58%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	18207	72.179.000		2.250.000	1522 9	-	192	46.142.000		11.633.000	15.421,0 0	60.025.000	84,70%	83,16%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		350	84.300.000,00	0	-	100	-	163	30.485.000		15.870.000	263,00	46.355.000	75,14%	54,99%
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		420	493.550.000,00	0	0	10	-	393	34.070.000		401.389.580	403,00	435.459.580	95,95%	88,23%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	259.172.000	20%	5.000.000,00	20%	15.024.000	20%	24.081.000	40%	189.979.600	100%	234.084.600	100,0%	90,32%
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	250.076.000	1	5.000.000	1	15.024.000	0	19.923.000	1	189.979.600	3,00	229.926.600	100,00%	91,94%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	15	9.096.000	0	0	0	-	2	4.158.000			2,00	4.158.000	13,33%	45,71%
												-	-		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diterbitkan	100%	581.771.000	25%	4.230.000,00	25%	33.714.150	25%	159.376.631	25%	324.802.841	100%	522.123.622	100,0%	89,75%

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2	89.610.000			1	24.014.150	0	22.074.631	35.660.841	1,00	81.749.622	50,00%	91,23%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	23	450.401.000			-		10	115.444.000	283.202.000	10,00	398.646.000	43,48%	88,51%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	41.760.000	0	4.230.000	0	9.700.000	1	21.858.000	5.940.000	1,00	41.728.000	100,00%	99,92%
PROGRAM											-	-		
	Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten	100%	43.519.115.916	40%	8.160.032.872	41%	11.649.056.397	14%	8.530.525.429	11.056.586.833	100,0%	39.396.201.531	100,00%	90,53%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase kebutuhan SDM yang direncanakan untuk UKP dan UKM	100%	42.137.300.916	25%	8.107.603.844,00	25%	11.303.505.678	25%	8.247.435.583	10.650.099.370	100%	38.308.644.475	100,0%	90,91%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	41.936.996.916	0,22	8.104.621.844	0,28	11.295.177.004	0,25	8.212.190.915	10.520.616.370	0,75	38.132.606.133	75,00%	90,93%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23	200.304.000	0	2.982.000	2	8.328.674		35.244.668	129.483.000	2,00	176.038.342	8,70%	87,89%
											-	-		
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM.	80%	1.381.815.000	5%	52.429.028,00	15%	345.550.719	20%	283.089.846	406.487.463	80%	1.087.557.056	100,0%	78,70%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	1.381.815.000	16	52.429.028	54	345.550.719		283.089.846	406.487.463	70,00	1.087.557.056	70,00%	78,70%
PROGRAM :											-	-		

	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Obat, Alkes dan Makanan dan Minuman	100%	61.749.700	25%	-	25%	4.596.000	25%	24.262.000	25%	12.159.200	100%	41.017.200	100,00%	66,42%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase pemberian rekomendasi penerbitan izin apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).	100	13.800.000	0	-	25%	4.596.000	25%	4.462.000	0	4.500.000	50%	13.558.000	50%	98,25%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	19	13.800.000			7	4.596.000	0	4.462.000		4.500.000	7,00	13.558.000	36,84%	98,25%
												-	-		
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	50%	32.274.800	5%	-	5%	-	10%	19.800.000	15%	-	35%	19.800.000	70,0%	61,35%
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	32.274.800					1	19.800.000			1,00	19.800.000	100,00%	61,35%
												-	-		
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Presentase sertifikat laik higienis sanitasi TPM yang diterbitkan.	40%	12.140.000	5%	-	5%	-	0	-	20%	4.140.000	30%	4.140.000	75,0%	34,10%

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	19	12.140.000									1,00	4.140.000	5,26%	34,10%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentasi stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan/terpasang.	50%	3.534.900	0	-	0	-	0	-	50%	3.519.200	50%	3.519.200	100,0%	99,56%
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	3.534.900									1,00	3.519.200	100,00%	99,56%
	Persentase UKBM Aktif	80%	1.076.622.240	40,0 0%	20.280.000	0,00 %	-	0	400.773.800	42%	339.934.211	81,70%	760.988.011	102,13%	70,68%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Germas)	Presentase kecamatan/desa/PKM yang mendapatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	40%	35.920.000	5%	-	5%	-	10%	19.215.000	20%	4.511.042	40%	23.726.042	100,0%	66,05%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	35.920.000,00									1,00	23.726.042	100,00%	66,05%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mempraktikkan PHBS	30%	53.494.200	10%	12.108.000,00	5%	-	10%	10.070.000	5%	26.237.669	30%	48.415.669	100,0%	90,51%

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	53.494.200,00	0	12.108.000	-	0	10.070.000	1	26.237.669	1,00	48.415.669	100,00%	90,51%
											-	-		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase UKBM aktif	58%	987.208.040	10%	8.172.000,00	-	10%	371.488.800	25%	309.185.500	50%	688.846.300	86,2%	69,78%
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	987.208.040	0	8.172.000	-	0	371.488.800	1	309.185.500	1,00	688.846.300	100,00%	69,78%
	Indeks Kepuasan Kesekretariatan	72	149.670.994.917	-	17.818.430.943	-	84,00	31.371.660.054		34.914.332.191	84,00	139.281.576.748	116,67%	93,06%
											-	-		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	163.614.490	40%	21.613.888,00	10%	19.603.975	21.966.000	30%	92.324.778	100%	155.508.641	1,0%	95,05%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	143.344.600	1	21.613.888	1	19.603.975	20.616.000	3	73.899.888	5,00	135.733.751	166,67%	94,69%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24	15.312.000	20	-	-	-	-	24	15.312.000	44,00	15.312.000	183,33%	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4.957.890	1	-	-	-	1.350.000	1	3.112.890	2,00	4.462.890	100,00%	90,02%
											-	-		
Adminitrasi Keuangan	Presentase dokumen dan laporan adminitrasi keuangan yang tersusun	100%	140.366.457.287	25%	16.181.739.110,00	25%	53.348.802.701	29.428.425.634	25%	31.765.731.570	100%	130.724.699.015	100,0%	93,13%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1090	140.246.689.287	273	16.181.739.110	272,5	53.348.802.701	29.414.943.234	1090	31.662.618.820	1.907,50	130.608.103865	175,00%	93,13%

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	7.900.000	0					7.592.400	1	-	1,00	7.592.400	100,00%	96,11%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	111.868.000	0					5.890.000	2	103.112.750	2,00	109.002.750	100,00%	97,44%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase adminitrasi kepegawaian PD yang tersusun	100%	25.000.000			-		-	4.430.000	100	20.244.751	10000%	24.674.751	10000,0%	98,70%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	25.000.000						4.430.000	1	20.244.751	1,00	24.674.751	100,00%	98,70%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan adminitrasi umum PD	100%	3.538.974.079	20%	583.325.854,00	25%	512.316.236	25%	842.670.296	30%	1.318.947.190	100%	3.257.259.576	100,0%	92,04%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	126.006.184	0,35	39.697.715	0,1	11.721.345	0	31.619.849	0,55	41.582.700	1,00	124.621.609	100,00%	98,90%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	482.980.600			0	6.966.900	0	188.185.200	1	269.930.800	1,00	465.082.900	100,00%	96,29%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	33.687.376	0,5	9.525.200	0	-	-		0,5	7.724.975	1,00	17.250.175	100,00%	51,21%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1.072.404.682	0,3	295.935.439	0,27	232.423.224	0	236.558.373	0,43	272.032.570	1,00	1.036.949.606	100,00%	96,69%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	221.221.887	0,2	39.172.900	0,02	3.111.800	0	38.888.500	0,78	136.640.300	1,00	217.813.500	100,00%	98,46%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	2.508.000	0		0,18	450.000	0	450.000	0,82	300.000	1,00	1.200.000	100,00%	47,85%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	1.600.165.350	2	198.994.600	12	257.642.967	0	346.968.374		590.735.845	14,00	1.394.341.786	140,00%	87,14%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pengadaan barang milik daerah yang dadakan	100%	384.003.513	10%	34.703.800,00	0%	-	25%	108.830.500	65%	230.711.433	100%	374.245.733	100,0%	97,46%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	110.520.000,00	1	34.703.800	-	0	0	1	68.710.700	2,00	103.414.500	100,00%	93,57%	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	150.590.296			-	0	0	1	84.089.337	1,00	149.096.337	100,00%	99,01%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	122.893.217			-	0	0	4	77.911.396	4,00	121.734.896	100,00%	99,06%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100%	3.867.833.522	25%	912.672.367,00	25%	1.054.550.048	25%	678.375.209	25%	911.938.465	100%	3.557.536.089	100,0%	91,98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	18.822.800	0,4	6.952.600	0,13	3.031.600	0	3.732.800	0,47	4.981.800	1,00	18.698.800	100,00%	99,34%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.839.959.072	3	763.768.767	4	886.333.033	2	485.021.349	4	440.630.500	13,00	2.575.753.649	108,33%	90,70%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	177.560.749	0,2	18.481.000	0,4	25.988.000	0	1.830.000	0,4	114.951.566	1,00	161.250.566	100,00%	90,81%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	831.490.901	0,1	123.470.000	0,3	139.197.415	0	187.791.060	0,6	351.374.599	1,00	801.833.074	100,00%	96,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	1.325.112.026	10%	84.375.924,00	25%	241.880.600	25%	286.962.415	40%	574.434.004	100%	1.187.652.943	100,0%	89,63%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	311.534.862			1	56.776.500	3	104.071.122	1	138.886.640	5,00	299.734.262	100,00%	96,21%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60	586.700.101	10	25.511.100	8	144.614.100	19	102.566.293	18	197.309.764	55,00	470.001.257	91,67%	80,11%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	319261063	0	9.765.000	0,31	40.490.000	0	66.365.000	0,69	194.978.000	1,00	311.598.000	100,00%	97,60%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	40.056.000				-	-		1	39.739.600	1,00	39.739.600	100,00%	99,21%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60.370.000	0,7	49.099.824		-	0	10.300.000	0,3	-	1,00	59.399.824	100,00%	98,39%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7.190.000				-	0	3.660.000	1	3.520.000	1,00	7.180.000	100,00%	99,86%
TOTAL			546.363.817.593	26,00%	33.280.142.790	18,28%			70.959.197.755		281.319.567.006		522.949.018.104		95,71%

3.1.8 Analisis Program, Dalam Pencapaian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan dan 78 sub kegiatan. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran, logistik pegawai, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan serta aset. Saat ini hanya 26 sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka menunjang urusan Kesehatan. Capaian kinerja pada program Urusan penunjang Pemerintah daerah tahun 2023 telah mencapai 116,67 persen dari target capaian 100 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 93,06 persen

2, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKM) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP)

Program UKM dan UKP terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 53 sub kegiatan. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan individu dan Masyarakat. Selain itu program UKM dan UKP merupakan tolok ukur kinerja dinas kesehatan dalam upaya penanganan stunting, kematian ibu, bayi dan balita serta pelayanan ibu hamil, bayi dan balita, anak sekolah, usia produktif, lansia, hipertensi, diabetes melitus, penanganan penderita TBC, HIV/AIDS dll. Target renstra untuk program UKM dan UKP adalah 100 persen namun pada tahun 2023 capaian kinerja program UKM dan UKP baru mencapai telah sesuai target yaitu 100 persen sedangkan kinerja keuangan sebesar 97,57 persen

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini ditujukan dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan termasuk distribusi tenaga kesehatan sampai ke daerah 3T yaitu terpencil, tertinggal dan kepulauan. Target renstra program ini adalah 100 persen sedangkan capain kinerja kegiatan pada tahun 2023 telah mencapai 90,53 persen, angka ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebrsar 86,3 persen

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 6 sub kegiatan. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik berupa obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang akan digunakan oleh 19 UPT puskesmas, 2 Rumah Sakit, 1 laboratorium kesehatan daerah. Target renstra program ini adalah 100 persen namun pada tahun 2023 capaian program Program ini baru mencapai 80 persen dengan realisasi keuangan 81,6 persen.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dimana masyarakat. Masyarakat bukan lagi sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan tapi juga menjadi subjek dalam pembangunan kesehatan. Target renstra program ini adalah 100 persen namun pada tahun 2023 capaian program Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan baru mencapai 103,12 persen dengan realisasi keuangan sebesar 70,68 persen

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan baik indikator kinerja utama maupun realisasi kinerja keuangan, walaupun beberapa kegiatan capaian kinerja melampaui target tahunan. Realisasi keuangan tahun 2023 mencapai 95,71 dan realisasi kinerja 75,58 persen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya walaupun ada beberapa indikator kinerja utama sudah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan, ini menunjukkan perencanaan yang disusun dapat di implementasikan sesuai dengan visi, misi, tujuan sasaran dan strategi dan kebijakan dinas kesehatan.